

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemajuan suatu wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun tingkat desa. Hal ini juga sangat relevan di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan. Desa ini secara administratif memiliki posisi strategis di Kabupaten Bekasi, daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat. Infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan fasilitas publik lainnya, menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi demi menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat desa.

Pembangunan merupakan upaya terencana dan terprogram yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan. Menurut Lesmana, pembangunan adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan terstruktur oleh suatu negara dan bangsa untuk mewujudkan pertumbuhan serta perubahan menuju modernisasi sebagai bagian dari proses pembinaan bangsa. Lebih spesifik, pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menyusun perencanaan yang mengacu pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber daya desa secara partisipatif (Permendagri No. 114 Tahun 2014).

Namun demikian, pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat kondisi jalan desa yang banyak mengalami kerusakan, belum meratanya akses air bersih, serta fasilitas umum yang belum optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat. Kendala lain yang juga muncul adalah keterbatasan anggaran desa dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam situasi ini, kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin lokal yang harus mampu menggerakkan seluruh potensi desa, mengoordinasikan program pembangunan, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan warga dan pihak terkait.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa berangkat dari prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembangunan desa difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui kebijakan, program, dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas desa (Fahlefi, t.t.). Sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan pedesaan diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan sarana dan prasarana guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan kepala desa bukan hanya berkuat pada kemampuan administratif, melainkan juga mencakup kemampuan memotivasi, menginspirasi, dan membangun partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai apa sebenarnya yang mereka butuhkan (Paksa Gwijangge, 2022:10)

Teori kepemimpinan partisipatif dan transformasional menyatakan bahwa seorang pemimpin yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif, membuka ruang inovasi, dan beradaptasi dengan kebutuhan lokal akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan kepala desa berkontribusi signifikan terhadap kemajuan pembangunan desa, termasuk di bidang infrastruktur.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pola dan strategi kepemimpinan kepala desa berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan pembangunan desa serta rekomendasi praktis bagi pemerintah Desa Cibatu dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur desa tersebut.

Pelaksanaan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dalam setiap programnya berarti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya dan potensi yang ada, serta turut serta dalam merencanakan, mengambil keputusan, dan mengevaluasi kegiatan pembangunan demi kesejahteraan mereka. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih berdaya. Khususnya di Kabupaten Bekasi, untuk mendukung kegiatan pembangunan tersebut, visi dan misi yang harus diwujudkan adalah peningkatan kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, peran kepala desa sangat penting dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pembangunan terutama di tingkat desa, terkait dengan pembangunan infrastruktur.

Sebagai dari Upaya peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan publik di wilayah tersebut, telah direncanakan serangkaian kegiatan Pembangunan dan perbaikan dilokasi strategis. Pada tahun anggaran berjalan, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi telah melaksanakan berbagai Pembangunan infrastruktur yang tersebar di beberapa wilayah Rt dan Rw. Adapun permbangunan tersebut terdiri dari perbaikan dan Pembangunan sarana jalan, drainase, balai warga, hingga sarana social lainnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi akses bagi warga. Setiap kegiatan didesain dengan ukuran dan spessifik yang disesuaikan dengan kebutuhan Lokasi, serta didukung oleh alokasi dana yang memadai. Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi, semua kegiatan terkait Pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu

Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi maka berikut tabel rincian APBDes dan Kegiatan pembangunan infrastruktur 2024 pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1

**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Cibatu
Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2024**

PENDAPATAN DESA				
NO	PENDAPATAN	SEMULA	MENJADI	KURANG LEBIH
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 93.500.000,-	Rp. 128.500.000,-	Rp. 35.000.000,-
2.	Pendapatan Transfer	Rp. 8.544.027.400,-	Rp. 11.002.407.900,-	Rp. 2.458.380.500,-
	- Dana Desa	Rp. 1.385.709.000,-	Rp. 1.385.709.000,-	Rp.
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 5.422.157.400,-	Rp. 7.563.261.900,-	Rp. 2.141.104.500,-
	- Alokasi Dana Desa	Rp. 1.606.161.000,-	Rp. 1.923.437.000,-	Rp. 317.276.000,-
	- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 130.000.000,-	Rp. 130.000.000,-	Rp.
3.	Pendapatan Lain-lain	Rp. 9.491.731,-	Rp. 9.491.731,-	Rp.
TOTAL PENDAPATAN		Rp. 8.647.019.131,-	Rp. 11.140.399.631,-	Rp. 2.43.380.500,-
BELANJA DESA				
NO	BELANJA	SEMULA	MENJADI	KURANG LEBIH
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 4.804.655.731,-	Rp. 5.451.148.644,-	Rp. 646.492.913,-
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.752.341.600,-	Rp. 3.625.363.687,-	Rp. 1.873.022.087,-

3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 1.193.621.800,-	Rp. 1.376.024.750,-	Rp. 182.402.950,-
4.	Bidang Pemberdayaan Desa	Rp. 691.200.000,-	Rp. 490.580.000,-	Rp. 200.620.000,-
5.	Bidang Penanggulangan Bencanaa Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 205.200.000,-	Rp. 260.439.265,-	Rp. 55.239.263,-
TOTAL BELANJA		Rp. 8.647.019.131,-	Rp. 11.203.556.344,-	Rp. 2.556.537.213,-
SURPLUS/ (DEFISIT)		-	Rp. (63.156.713,-)	Rp. (63.156.713,-)
PEMBIAYAAN DESA				
NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN		KURANG LEBIH
1.	Penerima Pembiayaan	Rp.348.956.713,-		Rp.348.956.713,-
	-SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.348.956.713,-		Rp.348.956.713,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.285.800.000,-		Rp.285.800.000,-
	-Penyertaan Modal Desa	Rp.285.800.000,-		Rp.285.800.000,-
3.	PEMBIAYAAN NETO	Rp.63.156.713,-		Rp.63.156.713,-
TOTAL PEMBIAYAAN		Rp. 697.913.426,-		Rp. 697.913.426,-

Sumber: Laporan APBDes Desa Cibatu 2024

Berdasarkan tabel diatas berikut penjelasan terkait APBDes di Desa Cibatu:

Pada dokumen APBDes Desa Cibatu, pendapatan desa terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Pada sisi pendapatan, tabel ini memisahkan antara Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain, lengkap dengan angka “semula”, “menjadi”, serta selisih kenaikan atau penurunannya. Pendapatan transfer kemudian dirinci lagi menjadi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi,

Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan Provinsi sehingga terlihat jelas sumber dominan penerimaan desa.

Pada sisi belanja, Tabel 1.1 membagi pengeluaran ke dalam lima bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan desa, serta penanggulangan bencana dan keadaan darurat, masing-masing juga ditampilkan dalam kolom “semula”, “menjadi”, dan “kurang/lebih”. Dari bagian ini tampak bahwa total belanja meningkat dari Rp 8.647.019.131,- menjadi Rp 11.203.556.344,- yang berarti terjadi penambahan anggaran cukup besar pada beberapa bidang, terutama pelaksanaan pembangunan desa.

Bagian pembiayaan desa menggambarkan bagaimana defisit anggaran ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal desa. Tabel menunjukkan bahwa terdapat defisit sebesar Rp 63.156.713,- yang kemudian ditutup oleh pembiayaan netto dengan nilai yang sama, sehingga keseluruhan struktur APBDes tetap seimbang antara total pendapatan dan total belanja plus pembiayaan.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat mengenai pengelolaan APBDes Desa Cibatu, khususnya dalam aspek pembangunan infrastruktur, diperlukan data yang lebih lengkap dan terperinci mengenai belanja desa serta pembiayaan desa. Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut. Berikut rincian dana desa yang diterima Desa Cibatu Kecamatan Cikarang elatan Kabupaten Bekasi per tahunnya:

Tabel 1. 2**Dana Desa di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi**

No	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2021	Rp 16.146.976.108,-
2.	2022	Rp 13.917.992.564,-
3.	2023	Rp 14.259608.162,-
4.	2024	Rp. 22.343.955.975,-
	Total	Rp 66.668.532.809,-

Sumber: Rincian Dana Desa di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Periode 2021-2024

Berdasarkan tabel 1.2 diatas bahwa jumlah dana desa yang diterima Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi periode 2021-2024 awalnya mengalami menurunan, namun setelah tahun berikutnya terus meningkat pesat. Tahun 2021 pemerintahn desa menerima anggaran dari pemerinntah pusat ini merupakan anggaran yang cukup besar, dana desa yang diterima Desa Cibatu Kabupaten Bekasi pada tahun ini sebesar 16.146.976.108 rupiah. Dimana dana ini pertama kali diturunkan oleh pemerintah Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan desanya.

Tahun 2022 dana desa yang diterima Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kaputen Bekasi menurun menjadi 13.917.992.564 rupiah. Tahun 2023 dana desa yang diterima oleh Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi bertambah menjadi 14.259608.162 rupiah. Tahun 2024 dana desa yang diterima Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kaputen Bekasi meningkat lebih pesat menjadi . 22.343.955.975 rupiah.

Setelah mengalami penurunan namun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan pesaat, dengan demikian penelitian ini hanya berfokus pada APBDes tahun 2024.

Proses penentuan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Tahun 2024 diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat pada tingkat RT dan RW melalui forum

musyawarah lingkungan. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, drainase, serta sarana penunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Aspirasi yang dihimpun kemudian direkap oleh pemerintah desa sebagai bahan awal perencanaan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Tahap berikutnya adalah pembahasan aspirasi tersebut dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Dalam Musdes dilakukan proses klarifikasi, verifikasi, serta penentuan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat luas, dan kesesuaian dengan arah pembangunan desa. Hasil Musdes selanjutnya dibawa ke forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2024.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes, ditetapkan sepuluh kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Cibatuh Tahun 2024 yang meliputi pengecoran jalan, pengaspalan lanjutan, perbaikan tanjakan, pembangunan drainase, turap, dan perbaikan jalan paving blok yang tersebar di beberapa wilayah desa. Total anggaran yang digunakan sebesar Rp818.330.270 dengan capaian progres rata-rata sebesar 89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hasil perencanaan yang berasal dari aspirasi masyarakat telah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pembangunan yang relatif berjalan baik, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya mencapai target penyelesaian.

Pada tahun 2024, Desa Cibatuh Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas fasilitas umum dan mendukung kesejahteraan masyarakat desa, sebagai berikut :

Tabel 1. 3

**Hasil Rincian Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan
Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Pada Tahun 2024**

No	Kegiatan	Keterangan	Lokasi	Biaya	Progres
1.	Pengecoran Jalan H. Ramin	P=175 L=5 T=0,15 M	Pinggir Jalan Tol	Rp.163.062.000	80%
2.	Perbaikan Tanjakan	L=174 m2	Kalimalang Depan Pelita Bangsa	Rp.66.561.000	100%
3.	Lanjutan Pengaspalan Jalan	P=350 L=4 T=0,3	Jl Hasanudin Rt 09	Rp.189.318.000	70%
4.	Lanjutan Pengaspalan Jalan	P=175 L=3 T=0,3	Jl HM Armin Rt 08	Rp. 73.260.270	70%
5.	Drainase Bosin/sawah	P=105	Kp Payingkiran Rt 05	Rp. 60.495.000	100%
6.	Turap Kalimalang	P=20 L=0,4 T=0,7	Kp Cibatu Rt 09	Rp. 9.351.000	100%
7.	Drainase Sulaima/Darsan	P=50	Rt 008	Rp. 30.472.000	100%
8.	Lanjutan Pengaspalan Jalan	P=350 L=4 T=0,3	Jl Teuku Umar Rt 03	Rp.189.318.000	70%
9.	Turap Ibu Nibah	P=23m L=0,4m T=0,6m	Kp Bangkuang	Rp.8.498.000	100%

			Rt 004 Rw 002		
10.	Perbaikan Jalan Paving Blok	-	Kp Bangkuang Rt 006 Rw 003	Rp.27.995.000	100%
JUMLAH				Rp.818.330.270	
RATA-RATA					89%

Sumber : Laporan Pembangunan Infrastruktur Desa Cibatu 2024

Berdasarkan tabel 1.3 diatas ternyata pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan hanya mencapai rata rata 89%. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan kepemimpinan kepala desa, yaitu:

1. Dalam proses perencanaan pembangunan idealnya, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui musyawarah desa. Namun, kenyataannya proses tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Kepala desa masih kerap mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat secara intensif, sehingga beberapa kebutuhan penting warga tidak tercakup dalam prioritas pembangunan.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Parta selaku Staff Perencanaan di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

“Gini neng terkait perencanaan pembangunan di Desa, sebenarnya sudah ada musyawarah untuk dengar aspirasi warga. Tapi seringkali Kepala Desa tetap ambil keputusan sendiri tanpa ajak warga ngobrol lebih dalam. Jadi, ada beberapa kebutuhan warga yang penting malah nggak masuk prioritas pembangunan. Warga sih berharapnya supaya musyawarah desa nanti bisa lebih terbuka dan warga benar-benar dilibatkan supaya semua kebutuhan bisa diakomodasikan”.

2. Pelaksanaan pembangunan kerap menemui kendala komunikasi antara pemerintah desa dan warga. Contohnya, dalam proyek pengaspalan jalan, terdapat warga yang keberatan karena tanah mereka akan terkena pembangunan tanpa adanya solusi yang memuaskan. Sementara kepala desa berusaha mengedepankan musyawarah mufakat, proses ini sering kali hanya bersifat formalitas dan keputusan akhir cenderung diambil secara sepihak. Hal ini menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan dikalangan masyarakat yang terdampak secara langsung.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H Borin selaku Ketua BPD di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

"Kalo soal pembangunan di Desa ya neng, kadang suka ada masalah komunikasi antara Pemerintah Desa sama warga. Misalnya, pas ada proyek pengaspalan jalan, ada warga yang nggak setuju karena tanah mereka kena dampak tapi nggak ada solusi yang bikin mereka puas. Kepala Desa sebenarnya pengen musyawarah, tapi sering cuma formalitas doang. Jadi, keputusan akhirnya nggak sesuai. Akhirnya warga merasa tidak adil dengan keputusan yang diambil oleh Kepala Desa".

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja kepala desa dalam mengelola anggaran dan mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih perlu diperbaiki. Transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan komunikasi yang lebih terbuka harus menjadi prioritas utama agar pembangunan desa benar-benar tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan warga.

3. Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu sangat berkaitan dengan aspek kepemimpinan kepala desa, terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Kepemimpinan kepala desa yang ideal harus mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui musyawarah desa, sehingga prioritas pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Namun, ketika kepala desa lebih sering mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat secara intensif, hal ini mencerminkan kelemahan dalam gaya kepemimpinan yang kurang partisipatif dan transparan.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Anum selaku Kepala Dusun di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

"Menurut pendapat saya gini neng, masalah pembangunan di Desa Cibatu memang banyak sebenarnya yang berkaitan langsung dengan kepala desa, terutama soal mengatur anggaran. kalo Kepala Desa yang ideal, dia harusnya bisa bikin warga aktif gitu, ikut musyawarah supaya apa yang dibangun itu sesuai sama kebutuhan dan keinginan warga. Tapi ada beberapa yang memang tidak berjalan sesuai, Kepala Desa kita sering ambil keputusan sendiri tanpa banyak ngobrol sama warga. Jadi, kepala desa kurang ngajak warga dan gak begitu terbuka neng"

Dengan demikian, permasalahan tersebut menunjukkan perlunya perbaikan dalam kepemimpinan kepala desa, khususnya dalam hal meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membangun komunikasi yang lebih terbuka serta konstruktif. Kepemimpinan yang baik akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan kebutuhan warga dan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat desa.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini berfokus pada analisis menyeluruh tentang **Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi**. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang, termasuk kepala desa, perangkat, tokoh masyarakat, dan warganya. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kuantitatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat disimpulkan Rumusan Masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi?

3. Upaya apa saja yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan Tujuan Penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan peningkatkan Pembangunan infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui Upaya apa saja yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.

1.4 Signifikansi Penelitian

Menurut penelitian sebelumnya, signifikasi penelitian didefinisikan sebagai dampak dari pencapaian tujuan penelitian. Signifikasi penelitian terdiri dari signifikasi akademis yang berkaitan dengan kemajuan ilmu atau kegunaan teoritis dan signifikansi praktis yang berkaitan dengan membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang terkait dengan subjek penelitian.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan observasi dan sejumlah data-data yang dikumpulkan, peneliti tertarik dengan mengangkat permasalahan terkait Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. Penelitian terdahulu terkait dengan gaya kepemimpinan yang menganalisis peranan kepala desa dalam Upaya mempercepat pembangunan desa telah banyak dilakukan, dan dijadikan rujukan didalam penelitian ini, kajian Pustaka yang dijadikan rujukan didalam penelitian ini terdiri dari jurnal ditabel berikut:

Tabel 1. 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Teti Hariati	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan kepala desa menggunakan gaya kepemimpinan situasional dengan pendekatan konsultasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan Masyarakat secara aktif melalui musyawarah. Selain itu hasil pembangunan yang dirasakan Masyarakat berupa perbaikan dan pembagian jalan serta pembangunan irigasi yang sangat bermanfaat khususnya bagi petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peneliti menyarankan agar kepala desa mempertahankan gaya kepemimpinan yang konsisten dan meningkatkan Kerjasama serta pemberdayaan Masyarakat agar partisipasi semakin optimal, Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur demi kemajuan Bersama. Namun Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan

			penelitian milik Teti Hariati karena berfokus pada analisis lebih mendalam tentang kepemimpinan kepala desa Desa Cibatua dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan infrastruktur. Penelitian ini tidak hanyaq menekan pada gaya kepemimpinannya saja, tetapi juga mengungkapkan masalah nyata seperti komunikasi yang buruk dari pengambilan Keputusan sepihak, yang berdampak pada partisipasi masyarakat. Hal ini meningkatkan penelitian tentang kepemimpinan kepada desa yang selama ini hanya berfokus pada gaya tetapi tidak mempelajari masalah operasional secara menyeluruh.
2.	Umar sune	Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukkan Kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, terlihat pada mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan

			mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan masih kurang atau tidak jalan, begitu pula pada pembangunan infrastruktur desa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan dan Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan hal ini tidak jalan. Begitupun Faktor penghambatnya masih dipengaruhi faktor intern seperti faktor kesadaran atau kemauan dan faktor ekstern yakni kepemimpinan pemerintah itu sendiri. Namun penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya melihat dari kinerja kepala desa di Desa Sidorukun. Penelitian ini berfokus pada kepemimpinan kepala desa di desa cibatu, yang tidak hanya menilai kinerja tetapi juga menganalisis tantangan seperti komunikasi dan Keputusan sepihak yang menghambat partisipasi Masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih
--	--	--	---

			luas untuk pengembangan kepemimpinan kepala desa dengan menekankan cara-cara praktis untuk mengatasi tantangan tersebut.
3.	Muhammad Rizal Fahlefi	Pembangunan Infrastruktur Desa Di Bungah Gresik Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 menunjukkan Aparatur pemerintah Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai pembangunan Desa, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan perspektif Fiqh Siyasah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan perspektif Fiqh Siyasah di Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perundangundangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari pandangan pembangunan menurut Fiqh Siyasah belum maksimal

		dilaksanakan oleh desa, karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi kemaslahatan kesejahteraan. Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga Masyarakat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Fahlefi berbeda dengan penelitian ini karena penelitian sebelumnya menggunakan pespektif Fiqh Siyasah dalam Pembangunan infrastruktur desa Bungan Gresik. Dibandingkan dengan pendekatan fuqh siyasah, penelitian ini berfokus pada kepemimpinan kepala desa di Desa Cibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kialitaif untuk menilai elemen perencanaan, pelaksanaan, dan hambata nyata seperti komunikasi dan partisipasi Masyarakat. Penelitian ini juga lebih berfokus pada cara kepala desa menangani masalah praktis dalam Pembangunan infraststruktur yang lebih kontekstual dan aplikatif.
--	--	--

4.	Ihwannudin dkk	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Desa di Pangkalan Bulan Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukan dalam upaya pengembangan infrastruktur desa pangkalan bulian sudah sangat baik, mulai dari perkembangan desa dan tangapan masyarakat tentang desa, bahwa kepemimpinin kepala desa pangkalan bulian ini sangat memenuhi kreteria seseorang pemimpin. Berdasarkan hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa kepemimpinan kepala desa pangkalan bulian memiliki gaya kepemimpinan “spporting leardership” yang di buktikan dengan tindakan kepala desa yang memberikan masukan terhadap perangkat desa tentang pembangunan yang akan di jalankan supaya bisa melibatkan semua perangkat desa dalam mengembangkan infrastruktur jalan yang akan di lakukan dan gaya kepemimpinan kepala desa tersebut terbukti efektif dalam mengembangkan infrastruktur desa dengan berhasilnya pembangunan jalan dalam desa untuk menuju jalan desa lain seperti yang di jelaskan oleh penulis melalui
----	-------------------	--	--

			dokumentasi terhadap jalan yang sudah di perbaiki. Namun penelitian ini berbeda dengna penelitian seblumnya yang berfokus pada gaya <i>supporting leadership</i> di desa pangkalan bilian, karaena penelitian ini berfokus pada kepmimpinan kepala desa cibatu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak hanya menilai gaya kepemimpinan, tetapi juga mengkaji masalah praktis seperti komunikasi dan pengambilan keputusan sepihak dalam pembangunan infrastruktur.
5.	Paru dkk	Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Didesa Salibabu Kecamatan Salibabu	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 menunjukan Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta

			untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Peneliti menyarankan untuk pemerintah desa khususnya kepala desa Salibabu, dimana sebagai seorang pemimpin tentu berkeinginan agar setiap warga masyarakatnya memiliki semangat keterlibatan yang tinggi baik dalam pembangunan desa maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Oleh karena itu sebagai kepala desa hendaknya lebih giat lagi dalam memberikan arahan dan bimbingan serta berani bertanggungjawab atas hasil kerja yang dicapai, selain itu juga pemerintah desa agar lebih memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga pemberdayaan
--	--	--	--

			masyarakat itu berjalan dengan baik, karena yang penting bukan hasil dari pembangunan tersebut tetapi bagaimana suatu pembangunan tersebut dilakukan. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Paru dkk yang menunjukkan keterbatasan peran kepala desa dalam memberdayakan Masyarakat di Desa Salibabu. penelitian ini berfokus pada hambatan komunikasi dan keputusan sepihak kepala desa di Desa Cibatut serta upaya konkret untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang lebih relevan dan solusi praktis untuk pembangunan infrastruktur desa.
6.	Hilman Abdul Latife	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Telagasari Kecamatan Banjarwangi Kabupaten Garut”	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan fisik desa telagasari belum melakukan fungsinya dengan baik. Karna, dilihat dari fungsi intruksi yang diberikan oleh kepala desa dalam pembangunan fisik selama ini sudah ada dan berjalan namun dalam pemberian intruksi/perintah belum

			menyeluruh dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
7.	Aldi Permana	Kepemimpinan Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pelaksanaan Kepemimpinan Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi termasuk dalam kategori baik. Indikator perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian menunjukkan hasil yang baik namun tetap memiliki hambatan, seperti kurangnya indentifikasi masalah, sosialisasi yang kurang, keterlibatan lurah yang minim, dan koordinasi yang kurang efektif. Peneliti memberikan saran berupa sosialisasi oleh lurah dan aparatur kelurahan perlu dilakukan secara baik dan intens agar Masyarakat paham pentingnya pembangunan. Dan lurah perlu memonitor bawahannya agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih baik dan giat. Namun Penelitian ini berbeda dengan penelitian Hilman Abdul Latife, yang lebih berfokus pada fungsi instruksi kepala desa di Desa

			Telagasari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih komprehensif untuk mempelajari lebih lanjut tentang elemen partisipasi masyarakat, hambatan komunikasi, dan pengelolaan anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur desa.
8.	Oswaldus Liqori Seran dkk	Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Naima Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka)	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa sangat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa. Kepala desa yang proaktif turun ke Masyarakat dan mampu menerima serta merespon kritikan dengan bijak, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan Masyarakat dalam proses pembangunan. Secara rinci kepemimpinan yang proaktif terbukti mempercepat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga kebutuhan serta harapan masyarakat dapat lebih cepat teridentifikasi dalam kebijakan pembangunan.

			Namun penelitian ini berbeda Berbeda dengan penelitian Oswaldus Liqori Seran dkk., yang berfokus pada kepemimpinan proaktif dan demokratis di Desa Naima, penelitian ini fokus pada masalah praktis seperti komunikasi dan pengambilan keputusan sepihak di Desa Cibat, serta solusi konkret untuk meningkatkan partisipasi dan efektivitas pembangunan infrastruktur desa.
9.	Aulia Endah Renita Sari	Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Pada Desa Tambahkan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukan bahwa Pengawasan pembangunan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pendekatan kemitraan di mana kepala desa dan masyarakat sama-sama terlibat dalam mengawasi jalannya pembangunan. Dalam memberikan motivasi kepada masyarakat, kepala desa menetapkan tujuan pembangunan yang jelas dan menanamkan komitmen bersama, sehingga menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan gaya kepemimpinan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

		operasional masih ada namun dianggap kurang maksimal karena beberapa kendala, seperti ketidaktepatan waktu. Meski demikian, masyarakat secara keseluruhan menerima hasil pembangunan dan diberi kesempatan untuk menilai hasil tersebut melalui tanggapan langsung kepada kepala desa. Hasil pembangunan yang telah dicapai selama masa kepemimpinan kepala desa saat ini antara lain perbaikan dan pemavingan jalan, pengadaan penerangan jalan umum (PPJU), serta pembangunan jembatan. Secara keseluruhan, kepala desa Tambakan menjalankan proses pembangunan infrastruktur dengan pendekatan partisipatif dan demokratis yang mengutamakan keterlibatan masyarakat. Namun Penelitian ini berbeda dengan penelitian Aulia Endah Renita Sari, yang menekankan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan melihat masalah komunikasi dan pengambilan keputusan sepihak
--	--	--

			serta menawarkan solusi konkret untuk mengoptimalkan peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Cibat.
10	Iskandar Dali dkk	Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Dari aspek komunikasi masih kurang, karena hubungan antara kepala desa dan aparat desa serta masyarakat di Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini kurang harmonis, kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kepala desa serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dari aspek tanggungjawab masih kurang, karena masih adanya penggunaan anggaran pembangunan desa yang belum sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan atau penggunaan anggaran menjadi tidak efektif membiayai program kegiatan yang ada di desa. Dari aspek keaktifan pemimpin masih kurang, karena pelayanan kepada masyarakat hanya dilakukan sekretaris desa. Kondisi ini terjadi karena kepala desa seringkali tidak berada di

		tempat yaitu di kantor desa, dan kadang-kadang kepala desa juga melakukan pelayanan kepada Masyarakat di rumahnya dan itupun jarang dilakukan kepala desa. Dari aspek motivasi masih rendah, karena kepala desa kurang memiliki kemampuan dalam menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan desa. Minimnya partisipasi dari masyarakat menyebabkan kegiatan pembangunan kurang efektif dan sering mengalami kendala. Secara keseluruhan penelitian mengenai Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur dilihat dari aspek komunikasi, tanggungjawab, keaktifan pemimpin dan motivasi masih rendah dan kurang mendukung pembangunan infrastruktur desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Namun Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Dali dkk., yang berfokus pada kinerja kepala desa di Desa Milangodaa Barat, dengan
--	--	--

			penekanan khusus pada aspek pengelolaan wisata dan anggaran. Studi ini berfokus pada masalah komunikasi, keputusan sepihak, dan solusi partisipatif untuk pembangunan infrastruktur Desa Cibat.
--	--	--	---

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teti Hariati (2018) mengenai gaya kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa. Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus kajian terhadap peran kepala desa sebagai aktor utama dalam pembangunan infrastruktur serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa. Namun demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada ruang lingkup analisis yang lebih komprehensif, karena tidak hanya menitikberatkan pada gaya kepemimpinan semata, melainkan juga mengkaji kepemimpinan kepala desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur, serta mengungkap permasalahan konkret berupa lemahnya komunikasi dan kecenderungan pengambilan keputusan secara sepihak yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Cibat.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Umar Sune (2019) yang mengkaji kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Kesamaan tersebut terletak pada objek kajian yang sama-sama memfokuskan perhatian pada peran kepala desa dalam proses pembangunan infrastruktur. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika kepemimpinan dan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Umar Sune terletak pada fokus analisis yang tidak semata-mata menilai kinerja administratif, melainkan menitikberatkan pada aspek kepemimpinan dalam konteks komunikasi,

transparansi, serta proses pengambilan keputusan yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.

Selanjutnya, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Muhammad Rizal Fahlefi (2022) yang menelaah pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persamaan tersebut terletak pada pembahasan tahapan pembangunan infrastruktur yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris yang lebih spesifik, yaitu melalui studi kasus di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, serta pada penekanan analisis terhadap praktik kepemimpinan kepala desa dalam menghadapi hambatan riil di lapangan, seperti keterbatasan komunikasi, konflik sosial terkait penggunaan lahan, dan pengambilan keputusan yang kurang partisipatif.

Berdasarkan perbandingan dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut, signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya kajian tentang kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan infrastruktur dengan menempatkan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai satu kesatuan analisis yang utuh. Selain itu, penelitian ini memberikan kebaruan secara empiris melalui konteks lokal Desa Cibatu dan secara konseptual melalui penegasan pentingnya kepemimpinan yang partisipatif, transparan, dan komunikatif sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan infrastruktur desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Bagi Peneliti

Maksud dilakukan penelitian ini Adalah sebagai syarat untuk mendapatkan syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Bekasi, serta menjadikan penelitian ini untuk menambah cakrawala wawasan intelektual.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan

Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

3. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintahan Kabupaten Bekasi dan Aparatur Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan karena dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk memecahkan masalah Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

4. Bagi Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip dan Politik Universitas Islam 45

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang relevan khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, selain itu penelitian ini bisa digunakan untuk bahan kajian dan pengembangan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan.

1.5 Sistem Matika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab dimana setiap bab terdiri dari sub-bab pembahasan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi paradigma penelitian, metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, goodness dan quality criteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN